

SETENGAH HATI TANGANI RADIASI

AS Kini Tolak 2 Kontainer Sepatu asal RI karena Kontaminasi Cs-137

Setelah penolakan ekspor udang beku dan cengkih karena diduga terpapar zat radioaktif, kini kasus serupa kembali mencoreng nama Indonesia di perdagangan internasional. Dua kontainer sepatu asal Indonesia ditolak Amerika Serikat (AS) setelah hasil uji mendeteksi jejak Cesium-137 (Cs-137). Yang membuat publik terperangah, pabrik alas kaki tersebut ternyata juga berlokasi di Cikande, Banten. Kawasan yang kini disebut-sebut sebagai 'zona merah' radiasi. Padahal, letak pabrik sepatu itu berada di luar kawasan industri Modern Cikande, berjarak sekitar lima kilometer dari PT Peter Metal Technology--perusahaan yang menjadi sumber awal kebocoran radiasi. Lebih mengejutkan lagi, salah satu kontainer sepatu yang ditolak itu ternyata sudah kembali ke tanah air. Pemerintah memastikan muatan tersebut aman karena tidak ditemukan paparan radiasi di permukaan kontainer saat diperiksa di pelabuhan. Namun, pernyataan yang saling tumpang tindih antar lembaga justru memicu keresahan publik. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis daftar berisi 24 perusahaan yang terindikasi terkontaminasi Cs-137, mencakup sektor peleburan logam, pengelolaan limbah B3, hingga industri makanan. Di antara nama-nama itu, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN)--raksasa pangan olahan berbahan baku unggas--menjadi sorotan utama. Pasalnya, meski Kemenperin memasukkan CPIN dalam daftar terkontaminasi, Satuan Tugas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 menyatakan hasil berbeda: clear and clean. Rangkaian peristiwa yang berulang di wilayah yang sama menimbulkan kesan bahwa penanganan masalah radiasi ini belum sepenuhnya tuntas. Alih-alih menenangkan, tindakan dan pernyataan pemerintah yang tidak seragam justru mempertebal kecurigaan publik bahwa penanganan kasus radiasi di Cikande dilakukan setengah hati.

BACA HAL 11...

Satgas gabungan melakukan proses dekontaminasi di 22 pabrik di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten. (Foto: KLH)

DAFTAR PERUSAHAAN DIDUGA TERKONTAMINASI RADIASI CS-137:

1. PT Bahari Makmur Sejati
2. PT Nikomas Gemilang
3. PT Citra Baru Steel
4. PT Valero Metals Jaya
5. PT Universal Eco Pacific
6. PT Sinta Baja Jaya
7. PT Crown Steel
8. PT Sentosa Harmony Steel (Hwa Hok Steel)

9. PT Vita Prodana Mandiri
10. PT Kanemory/Food Service
11. PT Charoen Pokphand Indonesia (CPIN)
12. PT Peter Metal Technology
13. PT Growth Nusantara Industry
14. PT Asa Bintang Pratama
15. PT Cahaya Logam Cipta Murni
16. PT Ediral Tritunggal Perkasa

17. PT Ever Loyal Copper
18. PT Hightech Grand Indonesia
19. PT Jongka Indonesia
20. PT Kabatama Raya
21. PT New Asia Pacific Copper Indonesia
22. PT O.M Indonesia
23. PT Zhongtian Metal Indonesia
24. PT Luckione Environment Science Indonesia

(Berdasarkan hasil pemetaan Kemenperin dan Bapeten di Kawasan Industri Modern Cikande)

PRABOWO DAN PM AUSTRALIA SEPAKATI PERJANJIAN KEAMANAN BARU



militer serta konsultasi strategis tingkat tinggi. Kesepakatan itu diumumkan usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anthony Albanese di Sydney, Rabu (12/11/2025).

Dalam konferensi pers di atas kapal HMAS Canberra, Albanese menyampaikan bahwa negosiasi substansial telah rampung dan perjanjian tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

"Kedua negara sepakat bahwa menjaga perdamaian dan keamanan hanya bisa dilakukan dengan bekerja

bersama," ujar Albanese.

I a m e n a m b a h k a n , penandatanganan resmi perjanjian akan dilakukan tahun depan di Indonesia. Kesepakatan ini memperdalam kerja sama pertahanan yang sebelumnya dirintis melalui pakta pertahanan 2024.

Dalam perjanjian baru itu, kedua negara akan berkomitmen melakukan konsultasi rutin antar pemimpin dan menteri mengenai isu keamanan. Selain itu, disepakati mekanisme koordinasi jika salah satu menghadapi ancaman terhadap keamanan nasionalnya.

"Jika salah satu negara terancam, kami akan berkonsultasi dan

mempertimbangkan langkah bersama yang bisa diambil," jelas Albanese.

Sementara itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya hubungan baik dengan Australia.

"Kita tidak bisa memilih siapa tetangga kita. Indonesia dan Australia adalah tetangga yang ditakdirkan. Maka kita harus menjalani takdir itu dengan niat baik," ujarnya.

Prabowo juga menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan dengan Australia, terutama dalam bidang pertahanan dan stabilitas kawasan.

Langkah strategis ini hadir di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Asia-Pasifik. Australia terus memperdalam hubungan dengan Amerika Serikat lewat pakta AUKUS, sementara Indonesia memilih bersikap netral, menjaga keseimbangan antara Washington dan Beijing.(rls,tin/dya)

SYDNEY — Indonesia dan Australia sepakat menjalin kerja sama keamanan baru yang mencakup peningkatan hubungan

EKONOMI JATIM TRIWULAN III 2025 TUMBUH 1,70%

Gubernur Khofifah: Pertumbuhan Tertinggi se-Pulau Jawa, Bukti Soliditas Semua Pihak



ekonomi Jatim yang luar biasa," kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya, Selasa (11/11/2025).

Ia menegaskan, capaian ini adalah hasil nyata dari kolaborasi berbagai pihak. "Di tengah fluktuasi ekonomi dunia, Jawa Timur mampu membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menjaga pertumbuhan yang stabil dan inklusif," ujarnya.

Secara year on year (y-o-y) terhadap triwulan III 2024, ekonomi Jatim tumbuh 5,22%, lebih tinggi dari nasional yang tumbuh 5,04%. "Dengan angka tersebut, Jatim tercatat penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa sebesar 25,65%, dan nasional sebesar 14,54%," terang Gubernur Khofifah.

Dari sisi produksi, Industri Pengolahan masih menjadi penyumbang tertinggi dengan kontribusi 1,87%, diikuti Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh 9,18%. Dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencatat pertumbuhan tertinggi 5,25%, menandakan meningkatnya aktivitas investasi di berbagai sektor.

"Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi (q-to-q) adalah pertumbuhan sektor pertanian, karena masuk masa puncak panen tebu dan tembakau," jelasnya.

Selain sektor pertanian,

peningkatan distribusi listrik dan gas untuk industri serta percepatan proyek infrastruktur turut menjadi katalis positif. Pertumbuhan y-o-y juga didorong oleh naiknya realisasi investasi, meningkatnya jumlah wisatawan nusantara, dan ekspor luar negeri.

Pertumbuhan komponen ekspor barang dan jasa terutama didorong ekspor perhiasan/permata serta meningkatnya perdagangan antarprovinsi melalui program Misi Dagang Jawa Timur dengan sejumlah daerah.

"Terakhir di Nusa Tenggara Timur mampu mencatatkan transaksi tertinggi sepanjang sejarah misi dagang yaitu mencapai Rp 1,882 triliun," ujar Khofifah.

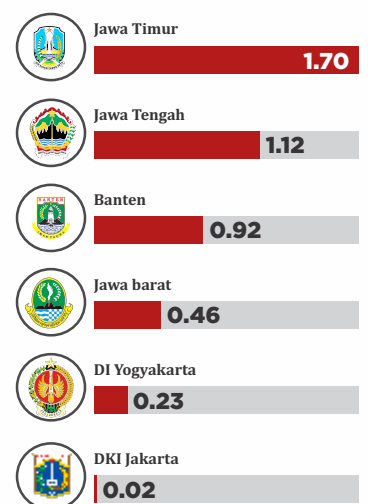
BPS mencatat ekspor Jawa Timur periode Januari–September 2025 naik 20,23% (c-to-c) senilai USD 3,86 miliar, dengan surplus perdagangan USD 1,33 miliar. "Hal ini membuktikan bahwa daya saing produk ekspor Jawa Timur meningkat. Negara tujuan ekspor non-migas masih didominasi Swiss, Tiongkok, dan Amerika," pungkasnya.

Menurut Gubernur Khofifah, capaian tersebut selaras dengan semangat "Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh" yang menjadi fondasi pembangunan daerah. "Tangguh berarti kemampuan Jawa Timur menghadapi tekanan global tanpa kehilangan arah. Terus Bertumbuh berarti konsistensi memperkuat produktivitas, memperluas investasi, dan menjaga kesejahteraan rakyat,"

ungkapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, dan industri atas sinergi yang terbangun. "Ini bukti ketangguhan dan kolaborasi seluruh kekuatan ekonomi daerah. Semangat ini adalah wujud dari filosofi Jatim Bisa, bahwa dengan kerja keras, gotong royong, dan inovasi, kita mampu menjaga ketahanan sekaligus menciptakan pertumbuhan yang berkualitas," pungkas Gubernur Khofifah.(adv)

6 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi



Berita resmi Statistik
BPS No.56/11/45/Th.XXIII, 5 november 2025

BAHAS TEKNIS RESTORATIVE JUSTICE DI REVISI KUHAP, DPR-PEMERINTAH BERDEBAT SENGIT

Pembahasan RUU KUHAP kini memasuki babak krusial ketika DPR menegaskan bahwa prinsip keadilan restoratif, yang memberi ruang bagi pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan harmoni sosial, harus menjadi bagian integral dari undang-undang acara pidana yang baru. DPR menyebut bahwa selama ini praktik restorative justice tersebar di berbagai lembaga secara terpisah, dan RUU ini diharapkan mengharmonisasi aturan tersebut agar tidak hanya berbasis represif namun juga solutif. Namun, pemerintah dan DPR ternyata belum sepakat dalam beberapa aspek teknis pelaksanaannya. Mulai dari syarat berlaku restorative justice (apakah hanya untuk tindak pidana dengan korban langsung), kewenangan penetapan, hingga pengesahan kesepakatan antara pelaku dan korban.

Komisi III DPR RI menggelar rapat panitia kerja (Panja) dengan pemerintah membahas RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Salah satu yang menjadi penekanan adalah pembahasan mengenai restorative justice (RJ).

Pemerintah diwakili Wamenkum Edward Omar Hiariej atau Eddy Hiariej. Eddy memaparkan RJ ini krusial untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan pasal tersebut.

Eddy mengatakan, keputusan RJ harus ditetapkan di pengadilan.

“Semua restorative justice itu boleh pada setiap tahap. Kalau pada penyidikan minta penetapan dari pengadilan, kalau pada penuntutan umum juga minta pada pengadilan dengan mekanisme seperti itu. Mengapa harus penetapan pengadilan? Supaya dia teregister, Pak,” kata Eddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Eddy mengatakan, mekanisme yang diatur dalam norma RUU KUHAP itu adalah setelah pihak mencapai kesepakatan, mereka harus memohon penetapan ke pengadilan. Setelah ditetapkan, baru laporan bisa dicabut.

Penjelasan Eddy itu mendapat sejumlah pendalaman oleh anggota Komisi III. Anggota Komisi III, Rikwanto menilai, usulan mekanisme itu apakah sudah tepat khususnya dengan kesiapan pengadilan dalam penanganan kasus.

“Memang mulai penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan harus melalui penetapan pengadilan. Kalau itu mekanismenya seperti itu, apakah pengadilan ini tidak kewalahan nanti dengan begitu banyaknya mungkin akan dilakukan suatu RJ?” Ujar Rikwanto.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi III Habiburokhman. Ia menilai, dengan mekanisme seperti itu akan lebih banyak pengadilan dalam menetapkan suatu perkara.

“Kita mempertimbangkan efek ini, Pak, apa namanya? Banjir perkara di pengadilan kira-kira seperti apa? Kalau semua, kalau yang RJ yang mulai penyelidikan, RJ penyidikan, RJ yang di



pengadilan, itu harus ada penetapan pengadilannya,” ujar Habiburokhman.

Sementara anggota Komisi III lainnya, Rudianto Lallo menilai, RJ ini harus melibatkan seluruh struktur hukum baik itu kepolisian, penyidik, hingga pengadilan.

Ia sepakat dengan usulan mekanisme RJ dari pemerintah bahwa RJ harus berkekuatan hukum melalui keputusan pengadilan.

“Karena kan di sini debatnya adalah mengapa orang itu diproses hukum, nanti kan ada pelanggaran

hukumnya. Pelanggaran hukumnya, negara yang mewakili lewat kepolisian, kan begitu filosofinya,” ujarnya. (wid,ist,kum/dya)

Pasal 137A

- **Ayat 1:** Terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena penyandang disabilitas mental dan atau intelektual berat, sebagaimana dimaksud KUHAP, pengadilan dapat menetapkan tindakan berupa rehabilitasi atau perawatan.
- **Ayat 2:** Tindakan sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan penetapan hakim dalam sidang terbuka untuk umum.
- **Ayat 3:** Penetapan tindakan sebagaimana dimaksud ayat 2 bukan merupakan putusan pemidanaan.
- **Ayat 4:** Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, pemeriksaan dan pelaksanaan tindakan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 31

- **Ayat 1:** Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkara itu wajib didampingi advokat.
- **Ayat 2:** Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat direkam dengan menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung.
- **Ayat 3:** Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud ayat 2, dilakukan untuk kepentingan penyidikan penuntutan atau dalam pemeriksaan sidang pengadilan atas permintaan hakim.
- **Ayat 4:** Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud ayat 2, digunakan untuk kepentingan pembelaan terhadap tersangka dan terdakwa.
- **Ayat 5:** Ketentuan lebih lanjut, mengenai penguasaan dan penggunaan rekaman kamera pengawas dimaksud pada ayat 3 dan 4 diatur dalam peraturan pemerintah.

Disepakati Pengidap Disabilitas Mental Tak Dipidana

REVISI Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan mengatur setiap orang yang mengidap disabilitas mental tidak bisa dipidana. Namun, akan direhabilitasi.

Pasal terkait hal itu telah diketok di dalam rapat Panja RKUHAP di Komisi III DPR RI bersama Panja pemerintah di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (12/11/2025). Aturan itu tertuang dalam Pasal 137A.

“Ini mengakomodir agar penyandang disabilitas mental itu mendapat rehabilitasi bukan pemidanaan, termasuk penyesuaian terhadap KUHAP,” jelas perwakilan tim perumus dan tim sinkronisasi RKUHAP, David dalam rapat Panja tersebut.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej sebagai ketua Panja dari pemerintah menjelaskan, aturan ini mengadopsi

aturan di dalam KUHP.

“Jadi dalam KUHP itu pasal 38, 39, tentang pertanggungjawaban pidana itu memang bagi penyandang disabilitas (mental), mereka dianggap tidak mampu bertanggung jawab, sehingga memang putusan itu memang bukan pemidanaan tetapi bisa merupakan suatu tindakan yang di dalamnya adalah rehabilitasi,” ucap Eddy di dalam rapat.

“Ini mereka koalisinya juga menemui kami pemerintah dan kami setuju Pak dengan usulan dari LBH Apik ini,” tambahna.

Para anggota Panja dari Komisi III merasa pasal tersebut sudah tepat. Mereka menyetujui pasal tersebut untuk masuk di dalam RKUHAP.

“Oke, ketok ya?” ucap Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman diikuti sorakan setuju oleh para anggota.

Dalam rapat itu juga disepakati pemeriksaan tersangka dalam

penyidikan akan diawasi dengan kamera pengawas.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyarankan agar rekaman tersebut dapat diakses oleh advokat daripada si tersangka. (wid,kum/dya)

KETAHUAN SEWAKAN LAHAN NEGARA, MENTAN AMRAN SEKETIKA PECAT 2 PEJABAT

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) marah besar dan seketika memecat pejabat eselon II dan III. Keduanya terbukti menyewakan lahan negara kepada pihak luar. Ini dilakukan Amran saat melakukan inspeksi mendadak di lahan percobaan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Diketahui, dari total lahan hanya 1 hektare yang dikelola. Sementara sisanya, 299 hektare disewakan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegakkan disiplin aparaturnya di lingkungan Kementerian Pertanian. Saat inspeksi mendadak di lahan percobaan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Amran langsung mencopot pejabat eselon II dan III yang terbukti menyewakan lahan negara kepada pihak luar.

"Di lahan kita 300 hektare, tapi disewakan pada orang. Ini tidak benar," tegas Mentan Amran di hadapan jajaran pegawai BRMP dikutip Rabu (12/11/2025).

"Kita ini punya teknologi, punya alat, punya sumber daya manusia, lahannya ada, tapi malah disewakan kepada orang. Ini tidak benar. Hari ini juga kami copot direkturnya dan eselon tiganya. SK-nya langsung saya serahkan di lapangan," ucapnya lagi.

Menurut Amran, tindakan pencopotan tersebut dilakukan sebagai bentuk ketegasan bahwa lahan percobaan milik negara harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan pengembangan, dan produksi benih unggul bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.

"Kami minta seluruh BRMP se-Indonesia menanam bibit dan benih terbaik. Harus lebih baik daripada lingkungannya. Gunakan teknologi terbaik. Jadilah contoh," ujar Mentan Amran.

Dia menghendaki hasilnya nanti dibagikan secara gratis pada masyarakat. "Ini yang kami mau, karena BRMP ini ada di seluruh Indonesia. Harus jadi yang terdepan," katanya.

Amran menegaskan bahwa sejak awal dirinya memimpin kembali Kementerian Pertanian, ia ingin membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil nyata di lapangan. Karena itu, ia tidak segan memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak amanah.

"Saya temukan satu hektare yang dikelola, sementara 299 hektare disewakan. Mulai hari ini, lahan itu harus dikerjakan kembali. Kami beri waktu tiga bulan untuk membuktikan hasil," tegasnya.

"Model baru sekarang, tidak perlu rapat lama-lama di kantor. SK dicopot atau diganti langsung di lapangan. Kalau saya temukan lagi kasus seperti ini, akan saya copot lagi," tegasnya.

Tak hanya itu saja, dirinya juga

Mentan Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak di lahan percobaan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (12/11/2025). (Dok. Kementan)



sedikit geram ketika mengunjungi BRMP Subang, ia menemui kantor tersebut yang sedikit kotor.

"Pokoknya, semua optimal, kantor yang harus baik. Jangan tunggu biaya, tak perlu biaya. Itu laba-laba, perlu biaya? Kenapa ada laba-labanya tadi? Nanti aku sidak, seluruh Indonesia, Hati-hati. Kantor kotor, kebunmu tidak ditanami, Kalau tanamamu mati, Bersamaan mati jabatanmu, ya?" lanjutnya.

Meski menegakkan disiplin dengan keras, Mentan Amran juga menyampaikan apresiasi kepada

jajaran Kementan dan seluruh pihak yang telah bekerja keras membawa sektor pertanian Indonesia mencapai hasil luar biasa dalam satu tahun terakhir.

"Kita bersyukur, rencana swasembada yang seharusnya empat tahun bisa tercapai hanya dalam satu tahun. PDB pertanian mencatat kontribusi tertinggi, kesejahteraan petani meningkat tajam, dan stok beras kita di Bulog tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan. Bahkan FAO memberikan pengakuan dan penghargaan kepada Indonesia," ujar dia.

Izin 190 Distributor dan Pengecer Pupuk Dicabut

MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pihaknya telah mencabut 190 izin pengecer dan distributor pupuk, karena telah melanggar beberapa ketentuan, di mana salah satunya yakni tidak menurunkan harga pupuk 20%.

Hal ini diungkapkannya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Amran menambahkan sebanyak 2.039 laporan masuk ke Kementerian Pertanian (Kementan).

"Yang saya lihat, ada laporan sebanyak 2.039, kemudian ada 190 yang terakhir (dicabut), kita evaluasi mingguan," kata Amran setelah sidak di salah satu gudang pupuk di Subang, Rabu (12/11/2025).

Dari beberapa pengecer dan distributor pupuk tersebut, ditemukan di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

"Kita sudah cabut izinnya, yang melanggar. Ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Utara," lanjutnya. Sebelumnya pada hari ini, Amran melakukan sidak ke beberapa pengecer dan distributor di Subang, di mana salah satunya yakni distributor pupuk Indo Tani 3 Sukamandi, Subang.

"Alhamdulillah, setelah kami keliling dari 7 provinsi, semua patuh pada arahan pusat (pada) arahan Bapak Presiden. Turun 20% harga pupuk, di seluruh Indonesia," ujarnya. (wid,rls/dya)

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tidak boleh membuat lengah.

"Ada yang salah, kita perbaiki. Tapi jangan biarkan pelanggaran sekecil apa pun menggerogoti amanah rakyat. Ini kepercayaan besar dari rakyat kepada kita," tegasnya.

Amran juga menutup arahnya dengan menegaskan bahwa capaian besar di sektor pertanian merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa.

"Swasembada ini bukan karena saya, tapi karena kita semua, termasuk teman-teman media, TNI, Polri, kejaksaan, gubernur, bupati, camat, kepala desa, PPL, semuanya. Ini hasil kerja kolektif atas gagasan besar Bapak Presiden," pungkasnya.

Diketahui sejak menjabat kembali di era Prabowo, Amran terus melakukan 'bersih-bersih'. Gelombang pertama pemecatan dimulai pada 28 Oktober 2024. Kala itu, Menteri Amran memerintahkan pencopotan seorang pejabat eselon II setelah ditemukan adanya transaksi suap senilai Rp700 juta terkait proyek di lingkungan Kementan.

Tak berselang lama, pada 31 Oktober 2024, tiga pejabat lain di tingkat eselon II dan III ikut dicopot. Mereka diduga meminta komisi 25 persen dari pengusaha yang ingin memenangkan tender proyek di Kementan. Nilai pungli yang dilaporkan mencapai sekitar Rp10 miliar. (gus,ist,rls,ini/dya)

GELOMBANG PEMECATAN PEJABAT KEMANTAN

- 28 Oktober 2024:**
Seorang pejabat eselon II dicopot setelah terbukti menerima suap Rp700 juta terkait proyek di lingkungan Kementan.
- 31 Oktober 2024:**
Tiga pejabat eselon II dan III ikut diberhentikan. Mereka diduga meminta komisi 25% dari pengusaha untuk memenangkan tender proyek, dengan total pungli mencapai Rp10 miliar.
- 3-4 Juni 2025:**
Dua pejabat strategis—seorang direktur dan pejabat pelaksana proyek—dicopot karena terlibat permainan proyek senilai Rp27 miliar, dengan realisasi pungli sekitar Rp10 miliar.
- 12 November 2025:**
Dua pejabat eselon II dan III dipecat usai inspeksi mendadak di BRMP Sukamandi, Subang, setelah terbukti menyewakan lahan negara kepada pihak luar.



PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE-61: MOMENTUM MENUJU KABUPATEN BLITAR SEHAT, BERDAYA DAN BERJAYA

BLTAR - Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-61 Tahun 2025, menjadi momentum menuju Kabupaten Blitar Sehat, Berdaya dan Berjaya menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan menggelar tasyakuran mengusung tema "Generasi Sehat Masa Depan Hebat" di Wisata Hutan Pinus Loji, Rabu (12/11/2025).

Tampak hadir Bupati Blitar Rijanto, Ketua TP PKK Kabupaten Blitar, Ny Ninik Rijanto, Wabup Blitar Beky Herdihansah, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi, Komisi IV DPRD, Kadinkes dr Christine Indrawati, Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Direktur RSUD Srengat, Kepala BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Muspika Gandusari, dan jajaran Puskesmas di Kabupaten Blitar.

Rangkaian kegiatan Puncak Peringatan HKN Ke-61 Tahun 2025, diawali dengan senam bersama, serta upacara HKN Ke-61. Kemudian digelar lomba program, lomba tumpeng dan defile dari ribuan peserta yang hadir.

Kadinkes Kabupaten Blitar, dr Christine Indrawati menyampaikan tasyakuran HKN ke-61 ini digelar dengan konsep untuk menurunkan angka Stunting, sekaligus meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

"Terlihat dalam tema defile tadi, yaitu makan buah dan sayur, olah raga, istirahat cukup, kelola stres, dan banyak minum air putih. Itu yang terus digaungkan," ujarnya.

Adapun tujuan digelarnya Peringatan HKN Ke-61 ini, lanjutnya, untuk mengapresiasi tenaga kesehatan (nakes) dan seluruh pihak, yang berkontribusi dalam pembangunan kesehatan di



Penyerahan penghargaan lomba dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-61 (atas) dan pemotongan tumpeng pada Puncak Peringatan HKN Ke-61 oleh Bupati Blitar Rijanto diserahkan kepada Kadinkes Kabupaten Blitar, dr Christine Indrawati (bawah).

Kabupaten Blitar dan Indonesia pada umumnya.

Mempererat silaturahmi antar nakes, instansi, dan masyarakat. Menumbuhkan semangat kolaborasi, dalam mendukung transformasi layanan kesehatan di Indonesia.

"Sekaligus sebagai momentum refleksi dan motivasi, terhadap capaian pembangunan kesehatan serta tantangan yang masih dihadapi bangsa," jelasnya.

Diungkapkan Christine, kegiatan ini dihadiri lebih dari 1000 orang, sesuai data peserta yang terdaftar lebih banyak yang hadir.

"Yang hadir pada acara ini sekitar 1300-1500 orang atau 2/3 nakes di Kabupaten Blitar, sementara sisanya yang 1/3 nya tetap melaksanakan pelayanan kesehatan untuk

masyarakat," ungkapnya.

Mereka yang hadir dari 6 RS swasta, klinik se-Kabupaten Blitar dan Puskesmas se-Kabupaten Blitar.

Sebelum sambutan, Bupati Blitar, Rijanto berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada Puskesmas yang berprestasi dalam mendukung program kesehatan di Kabupaten Blitar.

Dalam sambutannya, Bupati Rijanto mengatakan apa yang dicapai di usia ke 61 tahun, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Blitar sangat luar biasa.

"Atas nama Pemkab Blitar, saya mengucapkan Selamat Hari Kesehatan Nasional Ke-61. Peringatan ini bukan sekedar seremoni, tapi momentum refleksi dabl n motivasi bersama untuk

memperkuat komitmen membangun masyarakat yang sehat, produktif dan berdaya saing," tuturnya.

Sekaligus terima kasih kepada seluruh jajaran nakes, paranakes, Puskesmas, rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya di Kabupaten Blitar.

Dalam rangka pembangunan daerah, semangat HKN sangat sejalan dengan Catur Dharma Bupati dan Wabup Blitar, yaitu pelayanan yang berkeadilan. Pemkab Blitar komitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata dan inklusif, agar setiap warga tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk hidup sehat.

Ditegaskan Bupati Rijanto, tantangan kedepan tidak ringan dengan adanya masalah Stunting, penyakit menular hingga ancaman kesehatan lingkungan. Namun dengan sinergi lintas sektor, komitmen nakes serta dukungan masyarakat.

"S a y a y a k i n m a m p u menghadapinya, sehingga kualitas hidup warga Kabupaten Blitar meningkat secara berkelanjutan," tegasnya.

Bupati Rijanto juga mengajak, menjadikan HKN Ke-61 sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan kesadaran dan menggerakkan seluruh potensi daerah menuju Kabupaten Blitar Sehat, Berdaya dan Berjaya.

Ditambahkan Bupati Rijanto, selain kompak, juga efektif dan tepat sasaran dalam mengelola anggaran. Sehingga anggaran bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat, terutama bidang kesehatan.

"Menjadikan Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya, Jawa Timur Gerbang Nusantara dan Indonesia Emas 2045," pungkasnya.(Ais/Dya)

BGN UNGKAP MBG SUMBANG 48% KASUS KERACUNAN PANGAN

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memaparkan 48 persen dari total insiden keracunan pangan di Indonesia sepanjang 2025 disebabkan oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Data tersebut dipresentasikan Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada hari Rabu (12/11/2025), yang disiarkan secara live via akun Youtube DPR RI.

"Total kejadian keracunan pangan di Indonesia sampai hari ini ada 441. MBG menyumbang 211 kejadian, atau 48 persen dari kasus tersebut. Ada 11.640 penerima manfaat yang terdampak, dengan jumlah penerima manfaat yang dirawat inap 636 orang,

dan rawat jalan 11.004 orang," kata Dadan.

Berkaca dari temuan itu, Dadan menyoroti pentingnya percepatan tiga sertifikasi utama, yaitu Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan sertifikasi halal.

Upaya tersebut, menurutnya, harus diterapkan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui kolaborasi intensif dengan pemerintah daerah setempat.

Ia juga melaporkan status sertifikasi saat ini yang masih jauh dari ideal.

"Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, jumlah SPPG yang sudah memiliki SLHS hingga saat

ini sebanyak 1.619. Percepatan sertifikasi ini tergantung pada kebijakan pemda di masing-masing wilayah," sambung Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan BGN tengah berupaya memperbaiki tata kelola program prioritas nasional tersebut.

Beberapa peraturan baru ditekankan untuk dipatuhi oleh seluruh SPPG, termasuk kewajiban penggunaan rapid test untuk mencegah insiden keracunan makanan.

Standar kebersihan peralatan dan air juga menjadi fokus utama dalam perbaikan ini.

"Seluruh SPPG diwajibkan menggunakan alat sterilisasi ompreng atau food tray, serta menggunakan air

bersertifikat atau filter air untuk memastikan air bersih dalam proses memasak dan mencuci alat makan," papar Dadan.

Selain standar alat, standar sumber daya manusia juga ditingkatkan. Setiap SPPG diwajibkan memberikan pelatihan serta bimbingan teknis secara berkala kepada para penjamah makanan.

Tujuannya agar mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip higienitas, sanitasi, dan keamanan pangan.

Dia juga mengungkapkan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru berdiri kini maksimal melayani 2.500 penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).(wid,kcm,ist/dya)

Soroti Rencana Pembentukan Dinas Baru

KETUA DPRD KOTA MALANG: JANGAN SAMPAI APBD KOLAPS

MALANG - Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnangani Sirraduhita, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berhati-hati dalam merencanakan pembentukan sejumlah dinas baru.

Ia menilai, langkah tersebut harus dikaji secara cermat agar tidak membebani keuangan daerah dan berisiko membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun anggaran 2026 kolaps.

"Memang rencananya ada dinas baru. Nah itu juga saya kira butuh proses, ya, untuk kemudian ditata. Kalau bisa terlaksana tahun depan, ya kami akan lihat lagi proporsinya," ujarnya, ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, pembentukan dinas baru tidak bisa disamakan dengan pembentukan bidang di bawah satu dinas yang sudah ada. Sebab, dinas baru akan memiliki tanggung jawab dan beban kerja yang lebih spesifik dan terfokus.

Perempuan yang akrab dengan sapaan Mia, ini menambahkan, dalam

kondisi postur keuangan daerah yang belum sepenuhnya stabil. Ditambah dengan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat, efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dikaji kembali. Apalagi, sebagian besar struktur belanja daerah masih terserap untuk kebutuhan operasional.

"Makanya harus kami lihat. Ada beberapa dinas yang mandatory, seperti Disnaker-PMPTSP itu kan memang Disnaker harus terpisah. Kemudian UPT Pemadam Kebakaran yang sekarang di bawah Satpol PP, itu juga harus dipisah karena menyambut kota metropolitan," jelasnya.

Meski demikian, Mia menekankan, pembahasan soal pemecahan dinas baru harus tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Ia tidak ingin kebijakan tersebut justru membebani APBD dan mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.

"Bukan berarti menutup pintu. Tapi kan kami juga berhitung. Ini kan tujuannya baik, untuk lebih konsentrasi dalam bidang yang digeluti oleh dinas itu sendiri. Tapi dengan situasi dan kondisi saat ini,

kami coba kerjakan tanpa meninggalkan kaidah penting yang harus diselesaikan," ungkapnya.

Mia menyampaikan, pembahasan rencana tersebut akan mulai dilakukan DPRD bersama Pemkot Malang dalam waktu dekat. Dari pembahasan itu, akan dilihat kembali apakah rencana pemecahan dinas baru memungkinkan dijalankan pada tahun depan.

"Kalau memang tidak dimungkinkan, ya jangan dipaksa dulu daripada kolaps APBD kita. Kebutuhan dasar masyarakat nggak terpenuhi, kan kasihan," tegasnya.

Adapun beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang direncanakan akan dipecah, di antaranya UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) yang dipisah dari Satpol PP.



Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnangani Sirraduhita. (Santi/Lentera)

Kemudian pemecahan Dinas Sosial dari Dinsos-P3AP2KB, pemecahan Dinas Perkim dari Dinas PUPR-PKP, kemudian pemisahan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), pembentukan Bagian Kerja Sama, serta pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif (Ekraf). (Santi/Dya)

ANGKA STUNTING TURUN JADI 10%,

PEMKOT BATU PERKUAT PERAN POSYANDU DAN KADERNYA



Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto bersama Ketua TP Posyandu, Siti Faujiah, meninjau arena bermain anak dalam kegiatan Gebyar dan Jambore Kader Posyandu, Rabu (12/11/2025). (Santi/Lentera)

MALANG - Prevalensi stunting di Kota Batu tercatat menurun menjadi 10 persen per September 2025, dari sebelumnya 24,3 persen pada tahun 2023. Pemerintah Kota (Pemkot) Batu kini terus memacu peran serta dan komitmen para kader di ratusan posyandu. Langkah ini ntuk menjaga tren positif penurunan kasus stunting tersebut.

"Trennya dari dua tahun lalu memang terus menurun. Ini bukti dari

peran dan komitmen Dinas Kesehatan, kader posyandu, tenaga kesehatan, dan petugas puskesmas yang bersama-sama menangani stunting," ujar Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, ditemui usai acara Gebyar dan Jambore Kader Posyandu, Rabu (12/11/2025).

Heli menjelaskan, Kota Batu saat ini memiliki 193 posyandu yang tersebar di seluruh 3 kecamatan. Keberadaan posyandu dinilai penting karena menjadi salah satu pilar utama dalam upaya penurunan stunting. Serta pusat pelayanan dasar yang dekat dengan masyarakat.

Selain itu, menurutnya, Pemkot Batu juga telah menandatangani nota kesepahaman bersama seluruh pemerintah daerah di Indonesia, untuk memperkuat perhatian terhadap isu stunting. Kesepakatan ini

diharapkan memperluas kolaborasi dan memastikan penanganan stunting dilakukan secara berkelanjutan di berbagai sektor.

"Stunting itu tidak hanya disebabkan oleh makanan, tetapi juga dipengaruhi pola kehidupan, air, udara, dan lingkungan sekitar. Karena itu, penanganannya perlu pendekatan yang lebih luas," katanya.

Heli menambahkan, Kota Batu memiliki sejumlah faktor lingkungan yang mendukung, seperti udara sejuk dan air bersih. Namun, pola hidup masyarakat tetap perlu diperhatikan agar upaya penurunan prevalensi stunting dapat berjalan optimal.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu, Yuni Astuti, menjelaskan kegiatan Gebyar dan Jambore Kader Posyandu, ini menjadi bagian dari pembinaan dan penguatan kapasitas para kader.

"Melalui kegiatan jambore, kami ingin meningkatkan semangat dan keterampilan para kader. Ada beberapa lomba yang kami gelar, seperti lomba baduta sehat, posyandu berprestasi, kader berprestasi, senam kreasi, dan lomba pemberian makanan

tambahan," terang Yuni.

Kegiatan yang diikuti sekitar 400 kader posyandu ini, lanjutnya, menjadi bentuk nyata dari upaya pemerintah dalam menjaga kesinambungan program kesehatan masyarakat, terutama dalam mendukung penurunan angka stunting.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Penggerak (TP) Posyandu Kota Batu, Siti Faujiah, menilai peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) tahun ini menjadi momen penting untuk memperkuat kelembagaan posyandu.

Menurutnya, posyandu memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat. "Posyandu tidak hanya melayani ibu hamil, baduta, balita, dan lansia, tetapi mulai tahun ini juga menyediakan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas," ungkapnya.

Ditambahkannya, kader posyandu merupakan garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Melalui pendampingan dan edukasi, mereka berperan memastikan keluarga menjalani pola hidup yang lebih sehat dan sadar gizi. (Santi/Dya)

JEPANG MAU CAWE-CAWE SOAL TAIWAN, CHINA BERANG

Hubungan Jepang dan China kembali menegang setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan kesiapan negaranya menghadapi skenario terburuk di Selat Taiwan. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian, yang menulis komentar bernada ancaman, dengan menukiskan 'Memenggal leher kotor', meskipun kemudian unggahan itu dihapus. Jepang sendiri sebenarnya belum menentukan sikap tegas terkait potensi konflik di sekitar Taiwan, yang hanya berjarak sekitar 100 kilometer dari pulau terbaratnya, Yonaguni.

Dalam rapat dengan anggota parlemen, Takaichi menegaskan pentingnyaantisipasi terhadap potensi konflik yang bisa mengancam keselamatan Jepang.

"Jika keadaan darurat di Taiwan melibatkan kapal perang dan penggunaan kekuatan, maka itu menjadi situasi yang dapat mengancam keselamatan Jepang dari sudut pandang mana pun," ujar Takaichi, dikutip dari The Guardian, Rabu (12/11).

"Apa yang disebut kontingensi Taiwan telah menjadi begitu serius, sehingga kita harus mengantisipasi kemungkinan terburuk," lanjutnya.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian, yang menulis komentar bernada ancaman di platform X.

"Kami tak punya pilihan lagi selain memenggal leher kotor yang telah diserbu tanpa ragu. Apa kamu siap?" tulis Xue Jian. Unggahan itu kini telah dihapus setelah menuai kecaman dari pejabat Jepang.

"Kami memprotes keras dan mendesak agar unggahan itu segera dihapus," ujar juru bicara pemerintah Jepang, Minoru Kihara, yang menyebut pernyataan Xue sangat tidak pantas.

Dari pihak Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian justru membela Xue dan menuding Takaichi telah memprovokasi.

"China mendesak Jepang untuk merenungkan kesalahan historisnya dalam isu Taiwan dan berhenti mengirim sinyal yang salah kepada pasukan separatist kemerdekaan Taiwan," katanya.

Sementara itu, Kantor Kepresidenan Taiwan mengecam ancaman Xue Jian terhadap Jepang.

"Perilaku seperti itu jelas melanggar etika diplomatik," ujar juru bicara Karen Kuo.

Duta Besar AS untuk Jepang, George Glass, juga ikut bersuara.

"Topengnya lepas lagi," kata Glass, menilai ucapan Xue Jian sebagai ancaman terhadap Takaichi dan rakyat Jepang.

Menanggapi situasi ini, Takaichi menegaskan tidak akan menarik



Tentara memegang bendera Taiwan selama latihan peningkatan kesiapsiagaan yang menyimulasikan pertahanan melawan intrusi militer Beijing, di Kota Kaohsiung, Taiwan. (AP Photo)

pernyataannya. Ia menyebut komentarnya selaras dengan posisi resmi pemerintah Jepang, namun berjanji akan lebih berhati-hati dalam menanggapi isu keamanan sensitif.

Jepang sendiri belum menentukan sikap tegas terkait potensi konflik di

sekitar Taiwan, yang hanya berjarak sekitar 100 kilometer dari pulau terbaratnya, Yonaguni. Meski Konstitusi pascaperang Jepang melarang penggunaan kekuatan militer, perubahan kebijakan di era Shinzo Abe (2015) membuka ruang

Berjibaku dengan Bencana: 3.300 Warga Dievakuasi



PEMERINTAH Taiwan saat ini sibuk berjibaku dengan bencana. Lebih dari 8.300 orang dievakuasi dan 51 orang terluka di wilayah rawan Badai Tropis Fung-wong, Rabu (12/11/2025) malam waktu setempat.

Melansir AFP, badai tersebut diperkirakan akan membawa hujan deras dan angin kencang, sehingga membuat otoritas mengeluarkan peringatan siaga tinggi di sejumlah daerah.

dan banjir bandang meningkat tajam," ujar juru bicara CWB Lin Po-hung, dikutip dari Taiwan Central News Agency.

Sebagian besar warga yang dievakuasi berasal dari Kabupaten Hualien di pesisir timur, wilayah yang dikenal rawan gempa dan tanah longsor. Pemerintah setempat menutup sekolah dan kantor di wilayah selatan dan timur serta membatalkan seluruh penerbangan

domestik sebagai langkah antisipasi.

Hujan deras telah mengguyur Taiwan sejak awal pekan. Sebuah komunitas di bagian utara bahkan mencatat curah hujan mencapai 783,5 millimeter hingga Selasa malam.

"Curah hujan ekstrem ini berpotensi memicu tanah longsor besar di beberapa daerah pegunungan," kata pejabat Biro Kehutanan Taiwan.

Kondisi di Hualien menjadi perhatian khusus setelah tragedi pada September lalu, ketika sebuah danau penghalang di pegunungan meluap akibat topan dan menewaskan 19 orang. Danau yang sama kini terus diawasi karena dikhawatirkan kembali meluap seiring datangnya Fung-wong.

Video yang beredar di media lokal menunjukkan banjir bandang melanda desa berpenduduk 300 orang di Hualien, menyeret mobil dan menghanyutkan jalanan di dataran rendah.

Pemerintah menetapkan peringatan hujan lebat hingga Kamis (13/11/2025) pagi, ketika Fung-wong diperkirakan bergerak ke arah timur laut dan meninggalkan wilayah Taiwan. (afp,gus/dya)



Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi

bagi pembelaan diri kolektif, yang memungkinkan Jepang mendukung operasi militer sekutu seperti Amerika Serikat.

Hubungan Jepang-China memang rapuh sejak konflik abad ke-19 dan pendudukan brutal Jepang di China pada Perang Dunia II. Terpilihnya Takaichi, yang dikenal keras terhadap Beijing dan pro-Taiwan, dinilai dapat memperburuk relasi dua negara. Ia berjanji mempererat aliansi dengan AS serta meningkatkan anggaran pertahanan Jepang, langkah yang memicu kekhawatiran di China.

China menyampaikan protes resmi kepada parlemen Eropa atas pidato yang disampaikan Wakil Presiden Taiwan Hsiao Bi-khim, di hadapan sejumlah anggotanya. Perselisihan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara China dan Uni Eropa terkait perdagangan serta isu-isu lainnya. (gus,gud,ist/dya)

GAYA PARENTING EROPA YANG BISA JADI INSPIRASI KELUARGA INDONESIA

Dalam salah satu episode podcast bersama Nikita Willy, konsultan parenting asal Jerman, Vicky Nastasha, berbagi sudut pandang menarik tentang pola asuh anak di Eropa. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama mendidik anak bukanlah agar mereka sempurna, melainkan agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang dicintai, dihargai, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Apakah cocok untuk keluarga di Indonesia?

Setiap negara di Eropa memiliki nilai khas dalam pola asuhnya, namun semuanya berpijak pada keseimbangan antara kebebasan, disiplin, dan kasih sayang. "Parenting bukan tentang membuat anak patuh, tapi membentuk manusia kecil yang percaya diri, punya empati, dan tahu cara menghormati diri sendiri," ujar konsultan parenting asal Jerman, Vicky Nastasha. Berikut adalah lima gaya parenting dari negara-negara Eropa yang bisa menjadi inspirasi bagi keluarga Indonesia.

Jerman: Membangun Kemandirian Lewat Kepercayaan

Masyarakat Jerman percaya bahwa kemandirian tidak bisa diajarkan, tetapi harus dilatih. Sejak kecil, anak-anak diajak ikut bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari. Mulai dari menyiapkan sarapan, membereskan mainan, hingga mengatur waktu belajar sendiri. Orang tua Jerman jarang memarahi anak saat mereka membuat kesalahan. Bagi mereka, kesalahan adalah bagian dari proses belajar. "Kami membiarkan anak-anak mengalami konsekuensi alami dari tindakannya. Dari situ mereka belajar tanggung jawab," kata Vicky.

Belanda: Menumbuhkan Anak yang Bahagia tanpa Tekanan

Belanda dikenal sebagai negara dengan anak-anak paling bahagia di dunia, dan itu bukan kebetulan. Orang tua di sana percaya bahwa masa kecil seharusnya diisi dengan keseimbangan

antara belajar, bermain, dan waktu bersama keluarga. Mereka tidak menuntut anak untuk selalu berprestasi, melainkan mengajarkan pentingnya menikmati hidup dan tidak takut gagal. "Anak-anak Belanda belajar bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Justru dari situ mereka belajar bangkit dan mengenal diri sendiri," tutur Vicky.

Fokus utamanya adalah menciptakan lingkungan yang membuat anak merasa aman secara emosional. Dari rasa aman itulah lahir kebahagiaan yang sejati.

Prancis: Disiplin Elegan Penuh Kasih

Di Prancis, disiplin adalah bentuk kasih sayang. Anak-anak dibiasakan menunggu giliran, berbicara sopan, dan menghargai waktu makan bersama keluarga. "Kami tidak menegur dengan nada tinggi. Kami menegaskan batasan dengan cara yang tenang tapi konsisten," ujar Vicky.

Orang tua Prancis menekankan pentingnya kesabaran dan kontrol diri. Mereka percaya bahwa anak yang mampu menahan diri akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih fokus dan menghargai orang lain. Menariknya, kebiasaan sederhana seperti makan bersama di meja makan tanpa gawai menjadi bagian penting dari pendidikan karakter anak-anak di sana.

Finlandia: Belajar dari Alam dan Kehidupan Sehari-hari

Finlandia dikenal dengan sistem pendidikannya yang humanis, dan prinsip itu juga berlaku di rumah. Orang tua membiarkan anak berinteraksi langsung dengan alam, bermain di luar,



berlari di taman, menanam bunga, atau sekadar mengamati hewan kecil. "Alam adalah guru terbaik. Anak-anak belajar rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan empati dari interaksi mereka dengan lingkungan," kata Vicky.

Pendekatan ini diyakini dapat menumbuhkan anak yang tangguh, tenang, dan memiliki rasa syukur tinggi. Mereka belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar, melainkan dari kedekatan dengan dunia sekitar.

Denmark: Empati Sebagai Fondasi Utama

Denmark sering disebut sebagai negara paling bahagia di dunia. Salah satu rahasianya terletak pada cara orang tua menanamkan empati sejak dini. Anak-anak dididik untuk mengenali dan mengekspresikan perasaannya tanpa rasa takut dihakimi. "Kami tidak hanya mendengarkan anak, tapi juga mencoba

memahami dari sudut pandang mereka," ungkap Vicky.

Pola asuh yang penuh empati ini membuat anak tumbuh lebih percaya diri, hangat, dan mampu menjalin hubungan sosial yang sehat. Orang tua di Denmark juga berusaha menjadi teladan: mereka menunjukkan bagaimana menyelesaikan konflik dengan tenang dan menghargai perbedaan pendapat. Kelima gaya parenting di atas memiliki benang merah yang sama yaitu menumbuhkan anak melalui kasih sayang, kepercayaan,

Vicky menegaskan bahwa setiap budaya memiliki caranya sendiri dalam mendidik anak, namun nilai universalnya tetap sama, kehadiran orang tua yang penuh cinta dan konsisten. "Kita tidak perlu meniru persis gaya Eropa. Cukup ambil esensinya: menjadi orang tua yang hadir, sabar, dan autentik. Anak yang tumbuh dengan rasa aman akan menemukan jalannya sendiri," tutup Vicky. (ist, yt, tin/dya)



JEJAK MISTERIUS DI BATUAN KUNO SAAT MEDAN MAGNET BUMI BERPUTAR BALIK

Selama jutaan tahun, medan magnet Bumi menjadi pelindung setia planet kita dari badai partikel matahari. Stabilitasnya menjadikan kompas bekerja, jauh sebelum teknologi GPS ditemukan. Namun penelitian terbaru mengungkap bahwa kestabilan ini tidak selalu terjamin, bahkan pernah “menari liar” di masa lampau.

Sebuah studi baru terhadap batuan kuno di Pegunungan Anti-Atlas, Maroko, membuka bab menarik tentang sejarah medan magnet planet ini.

Pola aneh yang terekam pada endapan magnetik dari Periode Ediacara (630–541 juta tahun lalu) menunjukkan bahwa kutub magnet Bumi pernah bergeser dengan kecepatan luar biasa—jauh lebih cepat dari apa pun yang pernah terjadi dalam sejarah geologi modern.

Pada pertengahan Periode Ediacara, sekitar 591–565 juta tahun silam, kekuatan medan magnet Bumi melemah drastis hingga hanya sepersepuluh dari kekuatannya semula. Para ilmuwan menduga perubahan

besar ini mungkin terkait dengan kemunculan hewan-hewan Ediacaran—makhluk besar pertama yang mampu bergerak bebas di lautan purba. Namun melemahnya medan magnet itu hanyalah awal dari keanehan yang lebih besar.

Rekaman magnetik dalam batuan menunjukkan adanya fluktuasi ekstrem yang sulit dijelaskan. Sebagian ahli sempat mengira lempeng tektoniklah yang berputar lebih cepat dari biasanya, namun energi yang dibutuhkan untuk itu tampak mustahil. Alternatif lain pun muncul, kutub magnet Bumi sendiri yang mungkin berputar tak menentu, seperti jarum kompas yang kehilangan arah.

Menurut Profesor David Evans dari Universitas Yale, batuan di Anti-Atlas menyimpan jawaban penting atas misteri ini.

“Kami mengusulkan model

baru untuk medan magnet Bumi yang menemukan struktur dalam variabilitasnya, alih-alih mengabaikannya sebagai kekacauan acak,” ujar Evans. “Dengan metode statistik baru pada data paleomagnetik Ediacara, kami berharap dapat menghasilkan peta benua dan samudra yang lebih akurat dari masa tersebut.”

Mahasiswa doktoralnya, James Pierce, menambahkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan berbeda dari studi sebelumnya.

“Kami menganalisis perubahan kutub magnet Bumi pada resolusi stratigrafi tinggi, lapis demi lapis batuan, sambil menentukan usia pembentukannya secara presisi,” katanya.

Dari hasil pengamatan, tim mempersempit periode perubahan ekstrem itu menjadi antara 568 hingga 562 juta tahun lalu—yakni menjelang berakhirnya pelemahan medan magnet Bumi. Menariknya, fluktuasi cepat ini berlangsung hanya ribuan tahun, bukan jutaan tahun seperti yang biasa terjadi pada skala geologis.

Jika kesimpulan ini benar, maka bukan gunung-gunung yang bergeser, melainkan kutub magnetlah yang berpindah tempat dengan kecepatan luar biasa. Lebih mengejutkan lagi, data menunjukkan pola “bolak-balik” arah kutub, seolah-olah Bumi sempat ragu menentukan

utara dan selatannya.

Apa penyebab fenomena unik ini? Para ilmuwan belum sepenuhnya tahu. Yang jelas, periode Ediacara tampaknya menyimpan fase tak stabil yang mungkin berulang setiap sekitar 200 juta tahun.

Bukti serupa juga ditemukan pada masa Devon dan akhir Jura, meski untungnnya, tidak memicu kepunahan besar-besaran pada masa itu.

Evans menutup temuannya dengan refleksi mendalam, “Seluruh karier saya didedikasikan untuk memetakan pergerakan benua dan samudra sepanjang sejarah Bumi.

Periode Ediacara selalu menjadi tantangan karena data paleomagnetiknya sulit diandalkan. Jika metode baru ini terbukti akurat, kita bisa menjembatani masa-masa purba dan memahami dinamika lempeng tektonik secara utuh—dari awal pembentukan Bumi hingga hari ini.

“Ia menambahkan bahwa temuan ini bukan hanya akan memperkaya pemahaman ilmiah tentang sejarah geologi, tetapi juga membuka peluang baru untuk memprediksi pola perubahan iklim dan geodinamika masa depan.

Dengan memahami bagaimana benua saling bergerak dan berevolusi jutaan tahun lalu, para ilmuwan dapat menelusuri hubungan antara aktivitas tektonik dan kehidupan awal di planet ini.

Evans berharap penelitian lanjutan dapat memperdalam wawasan tentang bagaimana proses alam yang luar biasa kompleks itu telah membentuk dunia tempat kita hidup sekarang.” (ist,tin/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN “LENTERA TODAY”
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Rambut Sehat dan Berkilau Bisa Dimulai dari Rumah

Tak perlu selalu pergi ke salon untuk memiliki rambut indah dan berkilau. Faktanya, ada banyak cara sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk menjaga kesehatan serta kilau alami rambut tanpa mengeluarkan biaya besar.

Perawatan rambut bukan hanya tentang produk yang digunakan, tetapi juga soal memahami kebutuhan alami rambut itu sendiri. Dengan rutinitas yang tepat dan dilakukan secara konsisten, rambut dapat tetap lembut, kuat, dan berkilau layaknya hasil perawatan profesional.

Berdasarkan rekomendasi dari Epidermatology dan American Academy of Dermatology, berikut enam langkah perawatan rambut di rumah agar tetap sehat dan memesonakan seperti baru keluar dari salon.

Pahami Jenis Rambutmu

Langkah pertama menuju rambut sehat adalah mengenali karakter rambut sendiri. Tekstur, ketebalan, dan kadar kelembapan alami rambut menentukan jenis produk serta metode perawatan yang paling tepat.

Rambut lurus, misalnya, cenderung lebih cepat berminyak. Sementara rambut keriting atau bergelombang biasanya lebih mudah kering dan membutuhkan hidrasi tambahan. Dengan memahami jenis

rambut, apakah lurus, bergelombang, atau keriting rapat, kamu bisa menyesuaikan penggunaan sampo, kondisioner, dan serum agar hasilnya optimal.

Langkah sederhana ini membantu mencegah kesalahan perawatan dan membuat rambut tampak lebih sehat setiap hari.

Pilih Sampo yang Sesuai Kebutuhan

Sampo bukan sekadar pembersih rambut, melainkan fondasi utama untuk menjaga kesehatannya.

Untuk kulit kepala berminyak, gunakan sampo berformula ringan yang mampu mengangkat minyak tanpa membuat rambut kering. Sedangkan rambut kering dan rusak sebaiknya dirawat dengan sampo yang mengandung bahan pelembap alami seperti argan oil atau aloe vera.

Frekuensi keramas juga perlu disesuaikan. Rambut lurus mungkin perlu dicuci setiap hari, sementara rambut keriting cukup dua hingga tiga kali seminggu. Jika muncul ketombe atau rasa gatal, bisa jadi itu tanda bahwa kulit kepala memerlukan perhatian lebih.

Aplikasikan Kondisioner dengan Tepat

Banyak yang menganggap kondisioner hanya pelengkap, padahal fungsinya sangat penting untuk menjaga kelembapan rambut. Kondisioner bekerja menutrisi bagian batang hingga ujung rambut yang paling rentan kering dan patah.

Hindari mengoleskannya langsung ke kulit kepala agar rambut tidak cepat lepek.

Biarkan kondisioner meresap selama beberapa menit sebelum dibilas. Untuk hasil maksimal, gunakan deep conditioner seminggu sekali guna memperbaiki rambut yang rusak akibat panas, pewarnaan, atau polusi.

Jaga Rambut dari Paparan Panas

Alat penata rambut seperti hair dryer, catokan, dan curler memang membantu menciptakan gaya rambut yang diinginkan, namun terlalu sering digunakan bisa membuat batang rambut rapuh. Suhu panas berlebihan dapat merusak struktur rambut dan mengurangi kelembapan alaminya.

Gunakan heat protectant spray sebelum styling untuk meminimalkan

kerusakan. Sebisanya mungkin, biarkan rambut mengering secara alami dan kurangi penggunaan alat panas setiap hari. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu menjaga rambut tetap sehat dan kuat.

Tidur di Sarung Bantal Sutra

Gesekan antara rambut dan sarung bantal berbahan katun dapat menyebabkan rambut kusut, bercabang, hingga mudah patah. Sutra memiliki permukaan yang lebih halus, sehingga mampu mengurangi gesekan dan mempertahankan kelembapan alami rambut.

Tidur menggunakan sarung bantal sutra bisa menjadi investasi kecil untuk rambut yang lebih halus, lembut, dan bebas kusut setiap kali bangun tidur. Selain itu, bahan sutra juga membantu menjaga bentuk alami gaya rambut, terutama bagi mereka yang memiliki rambut keriting atau di-styling.

Dengan tekstur yang lembut dan kemampuan menyerap panas secara minimal, sarung bantal sutra juga membuat tidur terasa lebih nyaman dan sejuk.

Tak hanya baik untuk rambut, kain sutra turut memberi manfaat bagi kulit wajah karena tidak menyerap kelembapan berlebihan dan dapat mengurangi munculnya garis halus akibat tekanan saat tidur.

Penyuplai Kebutuhan Cairan Tubuh

Kesehatan rambut juga bergantung pada kondisi tubuh dari dalam. Mengonsumsi cukup air putih setiap hari membantu menjaga hidrasi kulit kepala serta memperkuat akar rambut. Kekurangan cairan dapat membuat rambut tampak kusam, kering, dan mudah patah.

Selain air putih, konsumsi buah-buahan yang kaya air seperti semangka, jeruk, dan mentimun untuk membantu menjaga hidrasi tubuh. Saat tubuh terhidrasi dengan baik, rambut akan tampak lebih berkilau dan sehat secara alami.

Ternyata, memiliki rambut indah dan berkilau tidak selalu bergantung pada perawatan salon. Dengan langkah sederhana dan konsisten di rumah, kamu bisa memiliki rambut yang sehat, lembut, dan bercahaya setiap hari. Cukup dengan memilih produk perawatan yang tepat, menjaga pola makan bergizi, serta rutin merawat kulit kepala, hasilnya bisa seefektif perawatan profesional. (wid,ist/dya)

5 Kesalahan Saat Keramas

1. Menggunakan Sampo yang Tidak Sesuai Jenis Rambut

2. Langsung Menuangkan Sampo ke Rambut Kering

3. Tidak Membilas Rambut dengan Tuntas

4. Mengabaikan Kulit Kepala

5. Menggunakan Terlalu Banyak Sampo



Setengah Hati ...dari hal 1

Satgas Penanganan Cs-137 membenarkan temuan kontaminasi Cesium-137 atau Cs-137 pada produk alas kaki yang di ekspor ke Amerika Serikat.

Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga Kemenko Pangan Bara Krishna Hasibuan mengatakan terdapat dua kontainer yang dinyatakan suspect Cs-137 dan dipulangkan ke Indonesia.

"Produk alas kaki tersebut berasal dari sebuah perusahaan industri alas kaki yang berlokasi di Cikande namun di luar kawasan industri dengan radius 5 KM dari sumber kontaminasi Cs-137 yaitu PT PMT," katanya, Kamis (12/11/2025).

Bara menyebut dua kontainer suspect tersebut dipulangkan ke Indonesia. Satu kontainer sudah tiba sebulan lalu, namun belum di proses pihak produsen.

"Sehingga belum ada pemeriksaan," tambah Bara.

Kemudian, kontainer kedua juga sudah tiba di Indonesia pada 29 Oktober 2025 dengan notifikasi adanya kontaminasi Cs-137.

"Sudah dilakukan pemeriksaan oleh BAPETEN pada 30 Oktober 2025. Hasilnya tidak ditemukan kontaminasi di permukaan sehingga aman disimpan di pelabuhan. Namun perlu dilakukan uji lab pada produk alas kaki yang akan dilakukan oleh BRIN," sebutnya.

Diketahui, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis daftar 24 perusahaan yang terkontaminasi Cs-137.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengungkapkan perusahaan yang terkontaminasi Cs-137 tersebut berasal dari berbagai industri, meliputi peleburan logam, pengelola limbah B3, hingga industri makanan.

Dia memaparkan sejumlah perusahaan yang terpapar radioaktif itu di antaranya yakni pabrik makanan olahan berbahan baku unggas, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) hingga PT Nikomas Gemilang, pabrik sepatu merek Nike hingga Adidas.

"Hasil pemeriksaan dan pemetaan yang sudah dilakukan di Kawasan Industri Cikande, terdapat tiga industri makanan yang memiliki paparan radiasi Cs-137 dengan laju dosis sebesar 1,6 hingga 152 mikrosievert per jam," kata Setia.

Selain itu, kata dia, terdapat tiga industri pengelolaan limbah B3 yang memiliki paparan radiasi Cs-

137 dan non Cs-137 dengan laju dosis sebesar 0,24 hingga 0,4 mikrosievert per jam.

Kemudian ada juga enam lokasi timbunan yang memiliki paparan radiasi Cesium-137 dengan laju dosis sebesar 11 sampai 10.000 mikrosievert per jam.

Paling banyak, ada 15 industri peleburan logam yang memiliki paparan radiasi Cs-137 dan non Cs-137 dengan laju dosis sebesar 0,18 hingga 700 mikrosievert per jam.

"Tim satgas dalam hal ini Kemenko Pangan sebagai Ketua Satgas menetapkan Kawasan Industri MCIE sebagai kejadian berupa insiden serius [serious incident]," ujarnya.

Akan tetapi, Setia menyebut saat ini 24 perusahaan tersebut telah dilakukan dekontaminasi. "Sudah beres semua," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium 137 (Cs-137) Bara Krishna Hasibuan menegaskan, produk-produk makanan olahan dari PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) aman dan tidak terkontaminasi.

Seperti diketahui, PT Charoen Pokphand Indonesia (CPIN) sebelumnya diduga terkontaminasi radiasi Cs-137 bersama dengan daftar 21 perusahaan lainnya.

Ia menegaskan, pihaknya telah selesai melakukan dekontaminasi pada pabrik Charoen Pokphand Indonesia. Sehingga pabrik tersebut dinyatakan bersih dan aman.

"Saya tegaskan bahwa pabrik PT. Charoen Pokphand Indonesia itu juga sudah selesai dilakukan dekontaminasi dan dinyatakan clear and clean," ujarnya dalam konferensi pers di gedung Graha Mandiri Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga sudah menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik fasilitas industri tersebut untuk bisa kembali beraktivitas secara normal.

"Kami tegaskan bahwa produk yang mereka hasilkan dinyatakan aman, termasuk produk makanan dihasilkan oleh PT. Charoen Pokphand. Kami ingin tegaskan bahwa informasi lain yang belum terverifikasi dan berbeda dari keterangan sub-case Cs-137 adalah tidak benar dan sub-case mengimbau agar informasi tersebut tidak diteruskan," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas tak mau

berkomentar terkait 24 perusahaan yang terkontaminasi Cesium-137 di kawasan industri Cikande, Serang, Provinsi Banten.

Saat ditanya terkait dengan dugaan Cesium-137 tersebut, Zulhas hanya diam dan mengalihkannya kepada Kementerian Pertanian (Kementan).

"Tanya [pertanyaan lain] ke Mentan saja," katanya sambil meninggalkan awak media usai rapat bersama Kementerian Pertanian, katanya Rabu (11/11/2025).

Buruh Desak Pemerintah Tanggung Jawab

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Juhur Hidayat mendesak agar perusahaan dan pemerintah agar bertanggungjawab terkait kasus kontaminasi Cesium-137 di kawasan industri Cikande, Serang, Provinsi Banten.

"Perusahaan menjadi pihak pertama yang bertanggungjawab membuat karyawan mereka kembali seperti semula. Membiayai semua pengobatan dan lain sebagainya," sebut Juhur, Kamis (12/11/2025).

"Negara juga turut andil bertanggungjawab, sebagai pengawas utama agar perusahaan tidak menghindar dari kewajibannya," tegas Juhur.

Menurut Juhur, pemerintah harus menyelesaikan masalah perusahaan yang terkontaminasi ini dan harus hadir menjadi pengawas nyata perusahaan untuk melindungi para pekerja nya.

Salah satu cara yang diusulkan Juhur adalah dengan melakukan ratifikasi atas hasil bahasan Konferensi Perburuhan Internasional (ILC-International Labour Conference) mengenai standar perburuhan internasional baru yang salah satunya mengatur mengenai bahaya biologis di tempat kerja, termasuk di fasilitas seperti pabrik.

"Saya mendesak pemerintah agar meratifikasi, mengundang-undang keputusan ILO itu. Karena ini masalah kemanusiaan," katanya.

Hasil konferensi ILO itu dinilai penting agar kedepan jika investor ingin membangun tempat usaha diberikan regulasi yang ketat.

"[Konferensi ILO] ini untuk kedepannya, bagaimana membuat pabrik, standarnya bagaimana. Tapi masalah yang sekarang ya harus diselesaikan, bagaimanapun susah nya," jelasnya.

Terpisah Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga Kemenko Pangan Bara Krishna Hasibuan mengeklaim bahwa pemerintah telah melakukan pengecekan kesehatan pada pekerja di kawasan industri Cikande, Banten.

Hal ini dilakukan usai didapati puluhan perusahaan yang terkontaminasi Cesium-137 atau Cs-137. Perusahaan yang terkontaminasi Cs-137 tersebut berasal dari berbagai industri, meliputi peleburan logam, pengelola limbah B3, hingga industri makanan.

"Seluruh pekerja yang ada di 22 pabrik itu yang terkontaminasi sudah kami cek semua kesehatannya, sudah kami umumkan. Memang ada 11 [orang] yang terkontaminasi, 11 pekerja itu adalah pegawai PT BMS dan PT PNT," kata Bara, Kamis (12/11/2025).

"Kami treatment ke rumah sakit untuk menjalankan treatment yang intensif, sudah selesai. mereka sudah pulang ke rumah masing-masing, jadi di Rumah Sakit Fatmawati tidak lama, dia sudah pulang ke rumah masing-masing," sebutnya.

Bara menekankan, semua pekerja di 22 perusahaan yang terdeteksi terkontaminasi Cs-137 telah dipastikan kesehatannya. Tak hanya itu, satgas juga memeriksa kesehatan masyarakat sekitar kawasan industri.

"Kami sudah lakukan pengecekan kesehatan, termasuk para warga tinggal di daerah sekitar, sudah juga kami lakukan pengecekan. Kira-kira total 1.800 orang pekerja dan warga yang sudah kami lakukan pengecekan kesehatan," jelasnya. (blo,ist,cnbc,tin/dya)

AREA TERINDIKASI TERKONTAMINASI

Data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), 20 Oktober 2025



Kawasan industri
22 pabrik

- Selesai dinetralkan: 20 pabrik
- Sedang dinetralkan: 2 pabrik



Kawasan nonindustri
13 area

- Selesai dinetralkan: 2 area
- Sedang dinetralkan: 11 area

MATERIAL TERKONTAMINASI

Data KLH, 20 Oktober 2025

Jenis material:

- Drum high-density polyethylene (HDPE)
- Tas besar material
- Palet

TOTAL:

248,4 TON MATERIAL DARI 13 LOKASI DIAMANKAN UNTUK DINETRALKAN.



DPRD JATIM DORONG REFORMASI FISKAL DAN KEADILAN ANGGARAN DALAM RAPERDA APBD 2026

SURABAYA — Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan laporan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (12/11/2025).

Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono, yang memimpin jalannya rapat paripurna, menegaskan, penyampaian laporan Badan Anggaran merupakan tindak lanjut dari laporan komisi-komisi DPRD yang sebelumnya telah dibahas secara mendalam. Ia menyebut, laporan tersebut akan menjadi dasar pijakan penting bagi setiap fraksi dalam memberikan pandangan akhir terhadap Raperda APBD 2026.

"Kita akan mendengar bersama penyampaian laporan Banggar atas APBD Jatim Tahun 2026 sebagai tindak lanjut dari laporan tiap komisi, yang ke depannya dapat menjadi pijakan bagi setiap fraksi di DPRD Jatim untuk memberikan pertimbangan yang mampu memiliki dampak demi kemaslahatan masyarakat Jawa Timur," ungkap Blegur.

Dalam laporan yang dibacakan oleh Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Jatim, Erick Komala, disebutkan bahwa total pendapatan daerah Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan mencapai Rp26,3 triliun. Dari total tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali menjadi penopang utama, dengan kontribusi mencapai 66 persen dari total pendapatan daerah.

"Komposisi pajak daerah dalam PAD 2026 menjadi kontributor dominan atau setara 76 persen dari total PAD," ungkap Erick dalam rapat paripurna.

Meski dominasi PAD terus menguat, Banggar mencatat bahwa pertumbuhan PAD tahun 2026 hanya meningkat sekitar 2 persen dibandingkan tahun 2025. Angka ini, menurut Erick, masih berada di bawah kategori moderat yang idealnya mencapai 5 persen.

"Target pertumbuhan PAD demikian diharapkan dapat dicapai secara maksimal, tidak sekadar melalui upaya progresif pemungutan pajak dan retribusi daerah, namun jauh lebih penting adalah melalui kebijakan reformatif dan korektif atas



Sidang Paripurna DPRD Jatim membahas Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun Anggaran 2026 Rabu (12/11/2025) dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono (Tengah), Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf (Kanan) dan Sekretaris Daerah Pemprov Jatim, Adhy Karyono (Kiri). (Foto-foto: DokHumasDPRDJatim)

pengelolaan aset daerah maupun terhadap kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD Jawa Timur," tegasnya.

Banggar menilai bahwa pemerintah provinsi perlu memperkuat pengelolaan aset dan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya melalui pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.

Selain soal PAD, tantangan terbesar APBD 2026 datang dari penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang cukup signifikan. Erick mengungkapkan, TKD Jawa Timur pada tahun depan diperkirakan menurun sebesar Rp2,8 triliun atau sekitar 24 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya beberapa komponen utama, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

"Tren penurunan TKD sejak tahun 2025 ini mencerminkan adanya konsolidasi fiskal pemerintah pusat, di mana dukungan transfer ke daerah lebih difokuskan pada efisiensi dan kinerja," jelasnya.

Banggar menilai, kondisi ini menuntut pemerintah provinsi untuk lebih adaptif dan inovatif dalam kebijakan fiskalnya, agar program prioritas dan pelayanan publik tetap berjalan optimal meski ruang fiskal menyempit.

"Badan Anggaran sangat berharap besarnya dampak penurunan TKD ini

masih mampu diantisipasi secara efektif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membiayai program prioritas dan pelayanan publik di tahun 2026," tegasnya.

Lebih lanjut, Banggar mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar menjadikan situasi ini sebagai momentum penting untuk melakukan reformasi dan restrukturisasi fiskal secara menyeluruh.

Menurut Erick, kebijakan fiskal Jawa Timur ke depan harus diarahkan agar lebih berkeadilan, adaptif, serta mampu memperkuat kemandirian daerah, tidak hanya mengandalkan tren pendapatan yang stagnan.

"Tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan pajak daerah, tetapi juga harus menata ulang struktur penerimaan dan belanja agar lebih produktif, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya penataan struktur anggaran berbasis output, di mana setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah provinsi dapat menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang terukur bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Anggota Badan Anggaran DPRD Jatim sekaligus Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri

Untari Bisowarno, menilai bahwa postur APBD Jawa Timur 2026 masih menampilkan karakter yang sama seperti tahun sebelumnya—yakni ketergantungan tinggi terhadap pajak daerah.

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap bertumpu pada pajak daerah. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib mengalokasikan porsi tersebut dalam APBD 2026 sebagai wujud tanggung jawab fiskal yang berkeadilan, agar pajak yang dibayar masyarakat benar-benar kembali dalam bentuk manfaat nyata — jalan yang lebih baik, transportasi yang lebih layak, dan mobilitas masyarakat yang lebih efisien," tegas Untari.

Ia menekankan bahwa keadilan fiskal harus diwujudkan melalui kebijakan anggaran yang mampu menghadirkan pemerataan hasil pembangunan. Setiap rupiah yang diperoleh dari pajak masyarakat harus dikembalikan dalam bentuk peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.

Menyikapi kebijakan penurunan TKD dari pemerintah pusat, Sri Untari menegaskan agar Pemprov Jawa Timur tetap berupaya menjaga capaian target kinerja pembangunan melalui langkah efisiensi dan inovasi anggaran.

"Meskipun terdapat kebijakan penurunan TKD, kita berharap Pemprov Jatim berupaya memastikan target kinerja tetap mampu dicapai oleh semua mitra melalui kebijakan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2026," katanya. (Pra,adv/Dya)

